

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. UU Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 1 Angka 1.
- Indonesia. Undang-Undang Pemerintah Daerah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 Angka 4.
- Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 8.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PP Nomor 18 Tahun 2017. Pasal 9 ayat (1).
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Permendagri No. 62 Tahun 2017. Pasal 1 Angka (4).
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Alinea 2.

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah. tentang
*Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* Pasal 1 angka
15a.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah.
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 362 Ayat (1) dan
Pasal 412 Ayat (1).

B. Buku

Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala
Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali, 2005.

Ana Retnoningsih, dan Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi
Ketiga*. Semarang: Widya Karya, 2008.

Andi Gadjong, Agussalim. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum.
Ctk. Pertama*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2007.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence). Termasuk Interpretasi Undang-Undang
(Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. 2009.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama. 2003.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama. 2008.

Beni Ahmad, Zulkarnaen. *Hukum Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.

Dadang Solihin, Dan Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama. 2004.

Dadang Solihin, dan Deddy Supriady Bratakusumah. *Otonomi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia
Pustaaka Utama, 2004. hlm. 379.

F, Tamin. *Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*.
Jakarta: Belantika. 2004.

Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia. 2007.

- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media. 2009.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Indriati, Maria Farida. *Ilmu Perundang undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Isra, Sadli. "Membongkar Skandal PP No. 37," *Kompas*. 5 Februari 2007.
- Kontjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Kelapa Gading Permai. 2007.
- M. Friedman, Lawrence. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Terjemahan dari *American Law An Introduction*. 2nd Edition. Alih Bahasa: Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa. 2001.
- Manila, I.G.K. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1996.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI. 2002.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 1995.
- Muslimin, Amrah. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni. 1986.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Ndraha, Taliziduhu. *Ilmu Pemerintahan Jilid I*. Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD. 2000.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology I. Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Nugroho D, Rianto. *Otonomi Daerah. Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta: Elek media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000.
- Nugraha, Safri. et.al. *Hukum Adminitrasi Negara*. Depok : CLGS-FHUI. 2007.
- Rasyid, Riyaas. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Jakarta: Yarsif Watampone. 1997.
- Rasyid, Riyaas. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widia. 2002.

- Romli, Lili. *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Suganda, Daan. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan di Daerah*. Bandung: Sinar Baru. 1992.
- Soemitro, Rony Hantijo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- S.P. Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Syarifuddin, Ateng. *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*. Ctk. Pertama. Bandung: Sumur Press. 1973.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo. 2006.
- Kencana Syafiie, Inu. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Surya Ningrat, Bayu. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Legino, Supriadi. *Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi: Kepemimpinan Transformasional dan Organisasi Lateral*. Jakarta: Indonesia Press. 2009.
- Thoah, Miftah. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- The Liang, Gie. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung. 1968.
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

C. Lain – Lain

Detik. <https://news.detik.com/berita/d-3536863/ada-pp-182017-tunjangan-hingga-fasilitas-anggota-dprd-bertambah>. diakses pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 21.30 WIB.

<https://www.bimtekнас.com/bimtek-hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dprd/>. diakses pada tanggal 19 Mei 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59f69b1de79df/penghasilan-dan-tunjangan-bagi-pimpinan-dan-anggota-dprd/>. diakses pada tanggal 19 Mei 2021.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 22.40.